



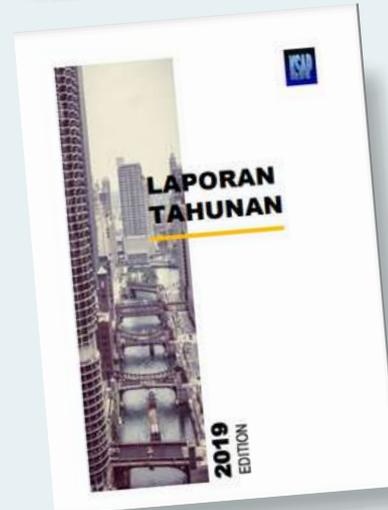
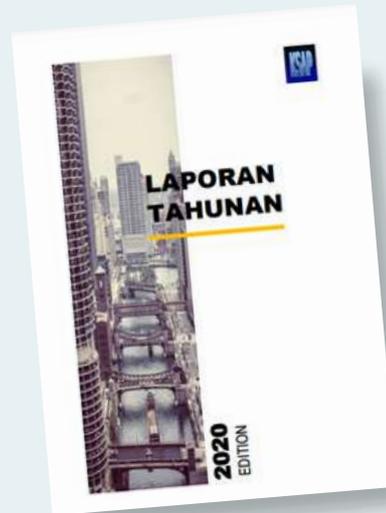
**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE

Percepatan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Memenuhi Tuntutan Perubahan, Kebutuhan Pemangku Kepentingan dan Kesesuaian dengan Standar Internasional



LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT 2023

Laporan Tahunan KSAP dari Tahun ke Tahun



Tim Penyusun

Pengarah – Sumiyati (Ketua Komite Kerja KSAP)

Penanggung Jawab – Esti Dwi Arvina (Kasubdit SAP)

Pemimpin Redaksi – Achmad Fauzi (Kepala Seksi FKSAP)

Kontributor – Satria Mahardika – Eka Rizkia Nabila – Michael Orsted Satahi

Sambutan

Ketua Komite Konsultatif

Hormat kami kepada para pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat melalui tahun 2023 dengan penuh semangat dan optimisme .

Para pengguna standar yang saya hormati, mengawali sambutan kali ini Saya ingin menyampaikan salam hangat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan perhatian semua pihak dalam proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan yang dinamis sesuai dengan tuntutan yang ada. Pada tahun ini, KSAP berada dalam momentum yang krusial dalam menjawab tuntutan penyusunan standar akuntansi pemerintah yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan standar internasional.

Sejak awal, KSAP telah berkomitmen untuk menjadi pionir dalam membentuk arah dan standar akuntansi pemerintahan yang relevan dan adaptif. Tahun 2023 menjadi tahun yang menantang namun penuh peluang untuk mempercepat penyusunan standar guna memenuhi ekspektasi masyarakat, pemangku kepentingan dan entitas pemerintahan.



Tantangan yang kita hadapi tidak dapat diabaikan. Perubahan ekonomi global, dinamika regulasi yang berkembang pesat, dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas memerlukan respon yang cepat dan tepat dari KSAP. Lingkungan yang kompleks memerlukan adaptasi, dan kita bertekad untuk menjadi agen perubahan yang proaktif.

Penting bagi kita untuk memahami secara mendalam prioritas dan kebutuhan entitas pemerintahan dalam merespons perubahan ini. Proses konsultasi dan kolaborasi yang intim dengan pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar yang kita susun benar-benar mencerminkan realitas lapangan.

Saya yakin bahwa inovasi akan menjadi landasan utama dalam percepatan penyusunan standar. Kita perlu terus berpikir kreatif, merangsang diskusi inovatif dan memastikan bahwa setiap standar baru yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif.

Keterlibatan aktif dari setiap anggota KSAP dan partisipasi yang kuat dari pemangku kepentingan eksternal merupakan faktor kunci dalam proses percepatan ini. Dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak akan memastikan bahwa kita dapat melampaui setiap rintangan dan mencapai kesinambungan dalam penyusunan standar.

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban KSAP atas pelaksanaan program kerja KSAP selama tahun 2023. Pada tahun ini, dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan kompleksitas lingkungan ekonomi dan regulasi, KSAP memuat semua kegiatan KSAP selama setahun terakhir dalam sebuah laporan tahunan yang bertemakan "Percepatan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Memenuhi Tuntutan Perubahan, Kebutuhan Pemangku Kepentingan dan Kesesuaian dengan Standar Internasional".

Mari kita bersama-sama memandu perubahan, menghadapi tantang tantangan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju percepatan adalah langkah yang tepat dan bermakna. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kita semua.

Jakarta, Januari 2024
Ketua Komite Konsultatif



Astera Primanto Bhakti

Laporan Ketua Komite Kerja



Salam sejahtera untuk para pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tahun 2023 menjadi periode yang menantang dan dinamis bagi KSAP. Di tengah perubahan ekonomi global dan penyesuaian regulasi yang cepat, kami dihadapkan pada tantangan untuk terus menghasilkan standar akuntansi pemerintahan yang responsif dan relevan.

Komitmen utama KSAP selama tahun ini adalah percepatan penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Melalui pertemuan rutin, kajian literatur, dan kolaborasi dengan ahli akuntansi, kami berhasil mengidentifikasi area-area kunci yang memerlukan pembaruan dan peningkatan.

Kami mengencangkan upaya inovasi dan kreativitas dalam penyusunan standar melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan mendengarkan masukan

dari berbagai sektor membantu kami memastikan bahwa standar yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan dinamika pemerintahan saat ini.

Pada tahun 2023, KSAP telah melakukan finalisasi penyusunan 5 (lima) draf PSAP yang telah ditunggu oleh para pemangku kepentingan, yaitu PSAP Pengaturan Bersama, PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi dan Aset Kontingensi, PSAP Agrikultur, dan PSAP Imbalan Kerja. PSAP-PSAP tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk dapat diproses dalam hal penetapan pemberlakuan atas PSAP tersebut.

Selain itu, KSAP juga telah mengirim paket draf PSAP Instrumen Keuangan (draf PSAP Instrumen Keuangan, draf PSAP Instrumen Keuangan-Penyajian, dan draf PSAP Instrumen Keuangan-Pengungkapan) kepada BPK untuk mendapatkan pertimbangan sebelum dilakukan proses finalisasi draf.

Sementara itu, dalam rangka memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan menyesuaikan dengan pengaturan dalam standar internasional, KSAP sampai dengan saat ini sedang berproses dalam penyelesaian beberapa draf PSAP

sehingga nantinya standar yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan memperkecil *gap* yang ada dengan standar internasional yang sampai dengan saat ini persentase kesesuaian SAP berbasis akrual dengan IPSAS telah mencapai kurang lebih 80%.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KSAP dalam setahun terakhir juga memberikan fasilitasi konsultasi penerapan SAP kepada instansi pemerintah dengan mengeluarkan surat jawaban konsultasi yang telah dibukukan menjadi buku Bunga Rampai SAP Tahun 2023. Selain itu, KSAP juga mempublikasikan Karya Tulis dalam bentuk makalah, majalah, dan artikel ilmiah terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh anggota KSAP pada halaman *website* KSAP serta konten terkait SAP dan kegiatan KSAP selama tahun 2023 melalui instagram KSAP.

Dalam kaitannya dalam kegiatan sosialisasi dan *Training of Trainers* (ToT) atas beberapa SAP yang baru (PSAP Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan PSAP Properti Investasi), KSAP di tahun 2023 telah melaksanakan beberapa kegiatan baik dilaksanakan secara mandiri maupun bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kegiatan sosialisasi antara lain dilaksanakan pada bulan Februari dan September 2023. Selain itu, di tahun 2023 KSAP juga telah menyelenggarakan kegiatan ToT PSAP 16 dan 17 di 3 lokasi yaitu Jakarta, Medan, dan Makassar.

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Tahunan KSAP ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP selama tahun 2023 kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat kilas balik kinerja, profil dan keanggotaan serta capaian tahun 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga dalam setahun ini KSAP mampu menyelesaikan penyusunan beberapa standar sesuai target yang telah direncanakan.

Kami berharap saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang dapat kami gunakan dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya.

Atas kerja sama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024
Ketua Komite Kerja



Sumiyati

Daftar Isi



**Sambutan Ketua
Komite Konsultatif**



**Laporan Ketua
Komite Kerja**



Daftar Isi



Executive Summary



**Kaleidoskop
Tahun 2023**



Profil KSAP



Keanggotaan KSAP



**Produk KSAP dan
Proses Penyusunan SAP**



**Capaian Kinerja
KSAP Tahun 2023**



**Laporan Pelaksanaan
Tugas Kesekretariatan
KSAP**



**Laporan Pelaksanaan
Tugas KSAP sebagai
Satuan Kerja**



Penutup

Executive Summary

Pada tahun 2023, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) berfokus pada percepatan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam memenuhi tuntutan perubahan, kebutuhan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan standar internasional.

KSAP memimpin upaya besar dalam mentransformasi PSAP, mengakomodasi perubahan regulasi dan memperhitungkan pergeseran dinamika ekonomi. Pembaruan signifikan diterapkan untuk menjawab kebutuhan entitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Selain itu, terkait dengan tujuan akhir komparabilitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan dunia internasional, penyusunan SAP juga harus sesuai dengan standar internasional yang ada, yaitu IPSAS. Sampai dengan saat ini persentase kesesuaian SAP berbasis akrual dengan IPSAS telah mencapai kurang lebih 80%. Adanya kesesuaian SAP dengan IPSAS ini menjadikan suatu jaminan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP dapat dikomparasikan dengan Laporan Keuangan negara lain secara internasional yang berkiblat pada IPSAS.

KSAP menjalin kerjasama erat dengan entitas pemerintahan, lembaga keuangan, dan akademisi untuk memastikan bahwa setiap perubahan

PSAP didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan praktis dan akademis.

Percepatan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan ditandai dengan adanya:

- 5 (lima) draf PSAP yang telah selesai disusun dan sedang dalam proses penetapan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu: PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, PSAP Pengaturan Bersama, PSAP Agrikultur, PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi, dan PSAP Imbalan Kinerja.
- 3 (tiga) draf PSAP yang telah dimintakan pertimbangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu draf PSAP Instrumen Keuangan, draf PSAP Instrumen Keuangan-Penyajian, dan draf PSAP Instrumen Keuangan-Pengungkapan.
- 1 (satu) draf PSAP yang siap dimintakan pertimbangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu draf PSAP Sewa.

KSAP berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahap penyusunan standar. Diskusi terbuka dan forum konsultasi digelar untuk mendengar masukan dan tanggapan dari berbagai pihak.

Ingin berkonsultasi dengan KSAP terkait PSAP?

Sobat KSAP dapat mengirimkan surat resmi melalui:



Pengiriman Dokumen Fisik

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptosuharjo III, Lantai II
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat
Telp 021-3449230 Int.5311

Email Resmi KSAP

sekretariat.ksap@gmail.com

01 Kaleidoskop Tahun 2023



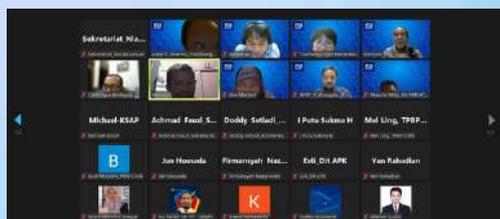
Januari

Selama bulan Januari 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Unit Penghasil Kas, draf PSAP Instrumen Keuangan, dan draf PSAP Sewa. Selain menyelenggarakan rapat, **KSAP juga menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Bekasi** dengan agenda konsultasi terkait koreksi pada aset tetap.



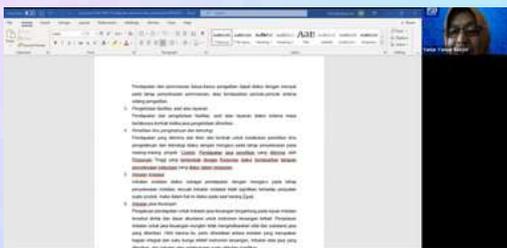
Februari

Selama bulan Februari 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Investasi, Revisi PSAP Kerangka Konseptual, dan draf PSAP Perubahan Selisih Kurs. KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 2 (dua) kali** dengan agenda pembahasan 5 (lima) draf PSAP dan PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran. Selain kegiatan rapat, KSAP juga menyelenggarakan **sosialisasi PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi dan PSAP 17 tentang Properti Investasi** dan **Focus Group Discussion (FGD) BPK sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda pembahasan 5 (lima) draf PSAP.



Maret

Selama bulan Maret 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan 5 (lima) draf PSAP yang telah dikirim ke BPK, lanjutan 5 (lima) draf PSAP yang telah dikirim ke BPK, dan draf PSAP Biaya Pinjaman. KSAP juga menyelenggarakan **rapat pleno komite konsultatif sebanyak 1 (satu) kali**. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 2 (dua) kali** dengan agenda pembahasan PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi. **KSAP juga menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta** dengan agenda konsultasi terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022.



Heritage Assets

- ▶ ED 78 mengusulkan pedoman yang dapat digunakan dalam rangka pengukuran dan pengukuran heritage PPE
- ▶ Hal tersebut dipandang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari aset bersejarah
- ▶ ED 78 juga mengusulkan adanya pengungkapan terkait aset bersejarah untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna laporan keuangan.
- ▶ Pada paragraf 65 PSAP 07 tidak diharuskan penyajian aset bersejarah di neraca namun mengharuskan pengungkapan pada Cat.K. Dengan demikian tujuan terkait disclosure pada ED 78 sudah tercapai.
- ▶ Sebelumnya, terdapat concern yang menandakan kesulitan pengukuran aset bersejarah atas consultation paper.

April

Selama bulan April 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 4 (empat) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, draf PSAP Penurunan Nilai Aset Unit Penghasil Kas, dan draf PSAP Sewa. KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

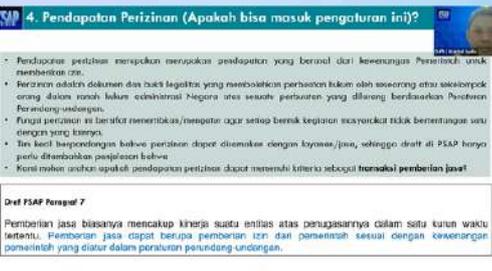
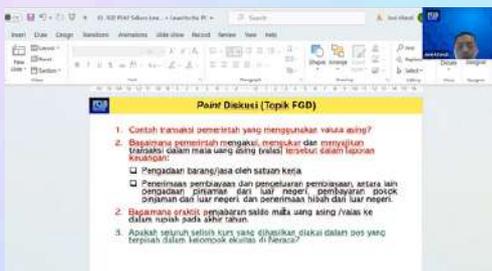
Mei

Selama bulan Mei 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Sewa, draf PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, draf PSAP Instrumen Keuangan, Revisi PSAP 05 Akuntansi Persediaan. KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 4 (empat) kali** dengan agenda pembahasan PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, PSAP Isu Strategis Internal KSAP, dan PSAP Akuntansi Persediaan. Selama bulan Mei 2023, **KSAP menerima 3 (tiga) kali kunjungan**, yaitu dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kota Gorontalo, dan Pemerintah Kota Bekasi.



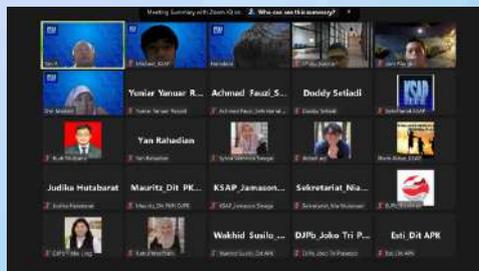
Juni

Selama bulan Juni 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 4 (empat) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, PSAP dari Pendapatan Transaksi Pertukaran, Revisi PSAP Kerangka Konseptual, dan Pertimbangan BPK atas 5 (lima) draf PSAP. KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Selisih Kurs. **KSAP juga menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Karawang** dengan agenda konsultasi terkait properti investasi. **KSAP kembali menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah** dengan agenda konsultasi terkait penganggaran belanja modal dan *Treasury Deposit Facility* (TDF).



Juli

Selama bulan Juli 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda pembahasan Pertimbangan BPK atas 5 (lima) draf PSAP. KSAP juga menyelenggarakan **Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda pembahasan Pertimbangan BPK atas 5 (lima) draf PSAP.



Agustus

Selama bulan Agustus 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan Revisi Draft PSAP 07 Aset Tetap, Revisi Draft PSAP 02 dan Kerangka Konseptual, serta Revisi PSAP Kerangka Konseptual dan Pengukuran. KSAP juga menyelenggarakan **rapat pleno komite konsultatif sebanyak 1 (satu) kali**.

September

Selama bulan September 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 4 (empat) kali** dengan agenda pembahasan Revisi Draft PSAP Kerangka Konseptual dan Pengukuran Lanjutan serta Revisi Draft PSAP 07 Aset Tetap, draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran dan draf PSAP Agrikultur, draf PSAP Pengaturan Bersama dan draf PSAP Aset Tetap, serta draf PSAP Kontingensi. **KSAP juga menyelenggarakan rapat tim kecil sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda draf PSAP Pengaruh Perubahan Kurs dan Valuta Asing. **KSAP juga menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Solok** dengan agenda konsultasi terkait pencatatan tanah HGU.



Oktober

Selama bulan Oktober 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Imbalan Kerja, draf PSAP Sewa, dan draf PSAP Aset Tetap. KSAP juga menyelenggarakan **Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 1 (satu) kali** dengan agenda pembahasan Model Nilai Wajar Aset Tetap berdasarkan IFRS dan **Training of Trainer PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebanyak 2 (dua) kali**. KSAP juga menerima kunjungan dari **Pemerintah Kota Bekasi** dengan agenda konsultasi terkait persediaan hilang dan TGR. **KSAP kembali menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Karawang** dengan agenda konsultasi terkait penyajian utang.



November

Selama bulan November 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 5 (lima) kali** dengan agenda pembahasan FGD Nilai Wajar Aset dan Otentifikasi, draf PSAP Pengaturan Bersama dan draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, draf PSAP Agrikultur, draf PSAP Imbalan Sosial, dan draf PSAP Aset Tetap. KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Pengaruh Perubahan Kurs dan Valuta Asing, draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, draf PSAP Sewa dan draf PSAP Agrikultur, serta draf Revisi PSAP 13 BLU. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan **Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 2 (dua) kali** dengan agenda pembahasan PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Revisi PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan BLU. Selama bulan November 2023, **KSAP menerima 3 (tiga) kali kunjungan**, yaitu dari Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



Desember

Selama bulan Desember 2023, KSAP menyelenggarakan **rapat pleno mingguan sebanyak 3 (tiga) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran, draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran dan draf Revisi PSAP 07 Aset Tetap, serta draf PSAP Penurunan Nilai Aset yang Menghasilkan Kas dan laporan *progress* PSAP pada tahun 2023. KSAP juga menyelenggarakan **rapat tim kecil sebanyak 4 (empat) kali** dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Unit Penghasil Kas, draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran dan Pendapatan dari Transaksi Pertukaran, draf Revisi PSAP 13 BLU, dan draf PSAP Pembahasan PSAP Penurunan Nilai Aset Unit Penghasil Kas. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan **Focus Group Discussion (FGD)** dengan agenda pembahasan draf PSAP Aset Tetap dan **Training of Trainer PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi dan PSAP 17 tentang Properti Investasi. KSAP juga menerima kunjungan dari Pemerintah Provinsi Aceh** dengan agenda konsultasi terkait penghapusan piutang dan properti investasi.



*Seluruh layanan yang
diberikan KSAP*

**TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN**



02 Profil KSAP



Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi tonggak sejarah penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia.

Terbitnya UU ini membawa pengaruh yang luar biasa di setiap sisi keuangan mulai dari hulu ke hilir. Berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 juga menjadi landasan penting bagi organisasi KSAP. Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus disusun oleh komite yang independen serta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun perjalanan panjang pembentukan KSAP diilustrasikan seperti gambar di bawah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004

tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 yang telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.

Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, dalam Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pembentukan KSAP



KSAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keanggotaan KSAP berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual-based accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut,

dalam rangka strategi menuju penerapan *accrual-based accounting*, KSAP telah menyusun SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada tanggal 13 Juni 2005.

KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

Visi:

“Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas”.

Misi:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai-Nilai Dasar KSAP:**1. Independen**

Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.

2. Profesionalisme

Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.

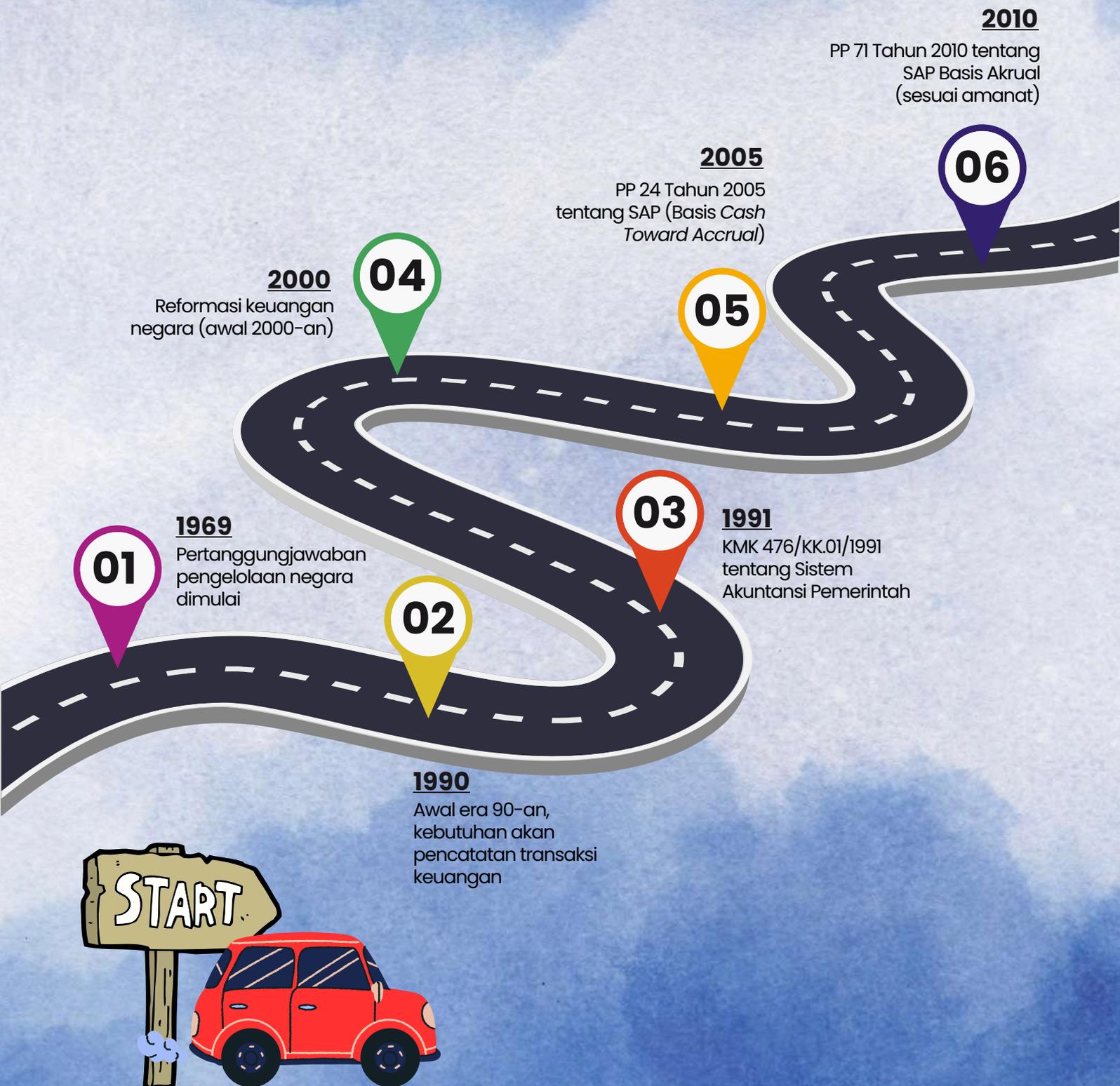
3. Demokratis

Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.

4. Universal

Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan pada semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

Perjalanan Standar Akuntansi Pemerintahan dari Masa ke Masa



03 Keanggotaan KSAP



Keanggotaan KSAP ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, ketiga kali diubah dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, keempat kali diubah dengan Keppres Nomor 30 Tahun 2016, dan kelima kali diubah dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017.

Sebagai organisasi independen, KSAP beranggotakan para profesional yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan/sector publik yang berasal baik dari lingkungan pemerintahan, asosiasi profesi akuntan, maupun akademisi. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Sedangkan Komite Kerja bertugas menyiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja dan dibantu oleh Sekretariat KSAP. Susunan organisasi dan tata kerja Kelompok Kerja ditentukan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja KSAP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Kelompok Kerja. Pemilihan kelompok kerja dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan.



POJOK FAKTA

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, diterbitkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004



Komite Konsultatif KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2017, keanggotaan komite konsultatif KSAP terdiri dari:

Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.

Ketua merangkap Anggota Komite Konsultatif



Direktur Jenderal Perbendaharaan saat ini dijabat oleh Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen di Universitas Soedirman pada tahun 1990. Melanjutkan dan menyelesaikan studi *Master of Taxation* di University of Denver pada tahun 1997. Memulai karier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1987. Dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 23 Januari 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 26 Juni 2018, dan pada 1 November 2022 diamanatkan menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si.

Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Konsultatif

Direktur Jenderal Keuangan Daerah saat ini dijabat oleh Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si. Jabatan lain yang pernah dijabat adalah Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri, Plt Sekretaris Fasilitas Kerjasama, Sekretaris Korpri, Kepala Sekretaris Pribadi Mendagri, Kepala Bagian Protokol, Kepala Subdit Dana Bagi Hasil (DBH) Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Seksi Otsus Papua, Papua Barat dan DIY. Merupakan lulusan S3 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (UNPAD) tahun 2009, S2 Ilmu Pemerintahan UNPAD tahun 2003, S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1999 dan menyelesaikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1994.



Komite Konsultatif KSAP

Dr. Ardan Adiperdana

Anggota Komite Konsultatif



Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Periode 2022–2026 dijabat oleh Dr. Ardan Adiperdana yang merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode Maret 2015–Juni 2019. Saat ini menjadi Staf Khusus I Menteri BUMN sejak Maret 2021 dan sebelumnya menjadi Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Akuntabilitas pada 2020–2021. Meraih gelar Akuntan setelah menamatkan jenjang DIV di STAN tahun 1987 dilanjutkan dengan memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Saint Mary University, Halifax, Canada tahun 1992, dan memperoleh Doktor bidang Manajemen Strategis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2013.

Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.

Anggota Komite Konsultatif

Sebagai anggota dari kalangan profesional, sebelumnya menjabat sebagai Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Kemananan–BPKP, sebelumnya menjabat sebagai Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian. Merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lalu melanjutkan S2 di Case Western Reserve University dan S3 di Cleveland State University , USA. Saat ini aktif sebagai anggota Forum *Corporate Governance* Indonesia, Anggota Dewan Pertimbangan Profesi IAI Kompartemen Akuntan Manajemen, Anggota Institut Management Accountant dan Anggota *Institute of Internal Auditor*. Dr. Binsar juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.



Komite Konsultatif KSAP

Prof. Dr. Mardiasmo, SE., AK., MBA.

Anggota Komite Konsultatif



Sebagai anggota kalangan profesional, pada Kabinet Kerja Pemerintahan Indonesia periode 2014–2019, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan sekaligus aktif sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *ex-officio* dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2010–2014 dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada periode 2006–2010. Saat ini juga aktif sebagai Komisaris pada PT Taspen (Persero), Dewan Pengawas RS. Fatmawati, dan Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

TUGAS KOMITE KONSULTATIF

- Memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Memberikan masukan kepada Komite Kerja terkait kegiatan yang menjadi prioritas;
- Memberikan alternatif solusi terhadap pending matters KSAP yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Kerja;
- Mengadakan pertemuan secara rutin dengan Komite Kerja, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Menjembatani pertemuan antara Komite Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
- Memberikan pandangan terhadap pemilihan anggota Komite Kerja; dan
- Tugas lainnya guna mendukung visi dan misi KSAP.

Berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2017, keanggotaan komite kerja KSAP terdiri dari:



Sumiyati, Ak., MFM.

Ketua merangkap Anggota Komite Kerja

Saat ini aktif sebagai Komisaris Indonesia *Financial Group* (IFG). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan, dan pada 2010 beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan. Merupakan akuntan lulusan STAN tahun 1989 dan memperoleh gelar *Master of Financial Management* dari Central Queensland University tahun 1994.

Dr. Dwi Martani, CA, CPA

Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Kerja

Saat ini Staf pengajar Departemen Akuntansi FEUI sejak 1993 dan anggota Komite Audit PT. Saka Energi Indonesia sejak 26 Desember 2021. Selain itu, juga aktif sebagai Anggota Dewan Pengarah Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia sejak 2013, Anggota Komite Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan Haji sejak 2019, dan Anggota Tim Teknis Narasumber Kebijakan Akuntansi Keuangan Gabungan BUMN sejak 2022. Merupakan lulusan Program Pascasarjana (S3) Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Manajemen, Program Studi Keuangan tahun 2004.



Komite Kerja KSAP

Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc.

Sekretaris merangkap Anggota Komite Kerja



Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji sejak 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015, menjabat sebagai Inspektur VI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Merupakan akuntan lulusan STAN tahun 1991 dan memperoleh gelar *Master of Science in Information Management, School of Engineering and Applied Science, The George Washington University, Washington, DC., USA* tahun 1994.

Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.

Anggota Komite Kerja

Dr. Jan Hoesada menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UGM pada tahun 1973. Kemudian dilanjutkan dengan S2 di MM-UI dan S3 di Program Ilmu Manajemen Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Pengalaman kerjanya diawali sebagai asisten auditor pada Kantor Akuntan Hanadi Rahardja, akhirnya saat ini menjadi pimpinan PT Multi Prima Widya Consultant. Di sela-sela kesibukan mengelola kantor, juga menjadi staf pengajar di beberapa perguruan tinggi, di antaranya MM-UI, Universitas Bina Nusantara dan MT-UI. Disamping itu, juga menyempatkan diri untuk menjadi pengamat humor di Indonesia. Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan sejak 1990 sampai sekarang.



Komite Kerja KSAP



Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM

Anggota Komite Kerja

Saat ini bertugas sebagai Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan BLU CPO fund. Pernah bertugas sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Alumnus STAN tahun 1989 ini memperoleh gelar Master di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Dr. Hamdani, Ak., MM, M.Si

Anggota Komite Kerja

Sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan dan Ekonomi dan Direktur Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri. Merupakan alumnus Universitas Andalas tahun 1987 dan memperoleh gelar Master di universitas yang sama, selain itu juga memperoleh gelar Master dari Universitas Sriwijaya dan melanjutkan studi S3 hingga meraih gelar Doktor Akuntansi dari Universitas Trisakti.



Komite Kerja KSAP



Amdi Very Dharma, Ak., MAcc., CA, QIA, CGCAE

Anggota Komite Kerja

Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola, Direktur Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri, Kepala Pusat Informasi Pengawasan, dan Direktur Pengawasan Bidang Perekonomian Lainnya. Menyelesaikan pendidikan S2 dan mendapatkan gelar *Master of Accountancy*, University of Dundee, Dundee, Inggris tahun 1993.

Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS

Anggota Komite Kerja

Saat ini menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1995, dan gelar *Master of Science in Accounting* di *Cleveland State University*, Amerika Serikat tahun 1999.



Komite Kerja KSAP

Doddy Setiadi, Ak., M.M., C.P.A

Anggota Komite Kerja



Saat ini menjabat sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I pada Deputy Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur BPKP, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan pada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP serta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Depok. Merupakan lulusan DIV STAN tahun 1981.

TUGAS KOMITE KERJA

- Menyiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Menyusun interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan; Menyusun buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan KSAP;
- Memberikan dukungan kepada Pemerintah mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan turunannya;
- Menetapkan keanggotaan unit pendukung KSAP yang terdiri dari Kelompok Kerja dan Mengusulkan keanggotaan Sekretariat KSAP;
- Berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan Komite Konsultatif dalam mendukung tercapainya tujuan KSAP;
- Mengkoordinasikan kelompok kerja dan sekretariat dalam mencapai tujuan KSAP secara efektif dan efisien;
- Melaporkan kegiatan KSAP kepada Menteri Keuangan;
- Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan/atau Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya sekali dalam periode keanggotaan; dan
- Menetapkan statuta dan mengusulkan perubahannya.

Kelompok Kerja KSAP

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2023 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-01/K.1/KSAP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang beranggotakan 32 orang dan berasal dari berbagai lembaga.

Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws

Drs. Agus M. Kristianto, Ak., MA.

Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert IPSAS

Jamason Sinaga, Ak.,MAP. CA. CRMP

Mauritz Cristianus R. Meta, SST., M.Ak. Cert IPSAS

Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA. Cert IPSAS

Didied Ary Setyanang, SST.,Ak., M.Prof.,Acc.

Budiman, SST., SE., Ak., MBA.

I Putu Sukma Hendrawan, S.E., PFM, CPMA, CRMO, RSA

Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE, Ak., CA.

Dr. Budi Mulyana, SE., M.Si.

Yan Rahadian, S.E., Ak., M.S.Ak., CA., CSRS

Ilham Akbar, S.Tr. Ak.

Achmad Fauzi, SE., M.Ak.

Judika Mariana Hutabarat, SE., MA.

Ingelia Puspita, S.E., Ak., M.Com.

Fahma Sari Fatma, SE. Ak., M.S.E

Muliani S. Fajarianti., SE.M.Ec. Dev., CA

Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert IPSAS

Joni Afandi, SE., Ak, M.Si., CA. Cert IPSAS

Isa Ashari K., SE.Ak., M.Ak., CA

Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS

Joko Tri Prasetyo, SST.,Ak., M.AcctgFin

Dr. Januarti Tiurmaida, SE., MM.

Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA.

Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA

Awaludin Mashudi, SE., M.Ak., CA

Agung Ariyanto, SE., Ak.

Dodok Dwi Handoko, S.ST Ak., M.Sc.

Muh. Tunjung Nugroho, SE., Ak, ME., CA.

Esti Dwi Arvina, S.I.P., M.B.A.

Wakhid Susilo, S.S.T., M.Acc..

TUGAS KELOMPOK KERJA

- Membantu Komite Kerja dalam perumusan dan pengembangan SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis; dan
- Membantu Komite Kerja dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan turunannya

Sekretariat KSAP

Sesuai dengan Keppres KSAP bahwa KSAP dapat dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Sekretariat KSAP Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Susunan keanggotaan Sekretariat KSAP Tahun 2023:

Achmad Fauzi, Kepala Seksi Fasilitas KSAP

Ilham Akbar, Anggota

Nia Esti Wulandari, Anggota

Satria Mahardika, Anggota

Michael Orsted Satahi, Anggota

Eka Rizkia Nabila, Anggota

Sekilas Produk KSAP

Dalam Kurun Waktu 2004-2023



Peraturan
Pemerintah

1

PP 24 Tahun 2005 PSAP CTA
(1 KK dan 12 PSAP)

2

PP 71 Tahun 2010 PSAP Akrual
(1 KK, 17 PSAP dan 1 Revisi PSAP)

Bultek Basis Kas
(14 Bultek)

1

Bultek Basis Akrual
(10 Bultek)

2



Buletin
Teknis



Bunga
Rampai

Bunga Rampai yang berisi
Pertanyaan dari Pengguna
Standar dan Jawaban KSAP
(Tahun 2011-2023)

4 Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP)



IPSAP

04 Produk KSAP & Proses Penyusunan SAP



Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa untuk menjamin independensinya, KSAP dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan bekerja berdasarkan proses baku penyusunan standar (*due process*). Selanjutnya dalam lampiran undang-undang dimaksud dijelaskan bahwa usulan standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pertimbangan BPK tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum draf standar tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004, KSAP telah menyelesaikan penyusunan 2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Basis Kas menuju Akrual dan SAP Basis Akrual), 24 Buletin Teknis (Bultek), 4 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan, serta Panduan SAP di Masa Pandemi *Covid-19*. Secara rinci produk KSAP terdiri dari:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun 2005, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- b. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual yang ditetapkan dalam PP 71 Tahun 2010, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual dan 12 PSAP;

- c. Revisi dan Penambahan PSAP yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PP 71 Tahun 2010 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang terdiri dari 2 Revisi PSAP dan 4 PSAP Baru.

2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP)

Bultek SAP merupakan penjelasan teknis akuntansi terkait penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sampai dengan tahun 2023, KSAP telah menerbitkan Bultek SAP yang terdiri dari:

- a. Bultek SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebanyak 14 Bultek
- b. Bultek SAP Berbasis Akrual sebanyak 10 Bultek

3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sampai dengan tahun 2022, KSAP telah menerbitkan 4 (empat) IPSAP SAP.

4. Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan merupakan kumpulan pertanyaan/kasus yang disampaikan oleh kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah beserta tanggapan yang dibuat oleh KSAP. Sampai dengan saat ini, KSAP telah menyusun 13 Edisi Bunga Rampai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023.

5. Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Masa Pandemi *Covid-19*.

Due Process Penyusunan Standar

Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, KSAP mengikuti proses baku penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*). Proses baku (*due process*) penyusunan standar sebagaimana terdapat pada lampiran III PP 71 tahun 2010 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:



1 Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.



2 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
KSAP dapat membentuk Pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.



3 Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.



4 Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja
Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.



5 Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

Peluncuran Draft SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada pemangku kepentingan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

Dengar pendapat dilakukan dalam dua tahap yaitu Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*)

KSAP menyelenggarakan dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draft SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.



Materi dan rujukan yang digunakan dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:

1

PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)



2

Produk IFAC
(*The International Federation of Accountant*)



3

Produk IASC/IASB (*The International Accounting Standards Committee/ International Accounting Standard Board*)



4

Produk IMF (*International Monetary Fund*)



5

Produk IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)



Ikatan Akuntan Indonesia

6

Produk FASB-USA (*Financial Accounting Standard Board-USA*)



7

Produk GASB-USA (*Governmental Accounting Standard Board-USA*)



8

Produk FASAB-USA (*The Federal Accounting Standards Advisory Board*)



9

Produk-produk lain yang dapat dijadikan rujukan

Langkah penyusunan SAP Akrual dilakukan dengan cara:

1. Pengembangan SAP basis *Cash Toward Accrual*
2. Mengacu pada IPSAS
3. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Sejalan dengan tuntutan harmonisasi standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan praktik terbaik di dunia internasional sehingga kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat diperbandingkan dengan negara-negara lainnya, KSAP menyusun standar sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku di dunia internasional. KSAP menggunakan strategi adaptasi atas standar akuntansi sektor publik internasional (*International Public Sector Accounting Standards*). Saat ini baru terdapat 25% produk IPSAS yang telah disusun oleh KSAP. Penekanan untuk mengacu kepada produk IPSAS juga disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui surat Nomor 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan untuk penyusunan 13 standar baru dengan mengacu pada standar IPSAS.



Kumpulan Bunga Rampai

Standar Akuntansi Pemerintahan

Tahun 2011 – 2023



Dapat diunduh melalui:

<https://bit.ly/BungaRampaiKSAP>

05 Capaian Kinerja Tahun 2023



PENYUSUNAN DRAF STANDAR DAN BUNGA RAMPAI TAHUN 2023

1. Penyusunan Draft Standar Tahun 2023

a. Draft Final PSAP

- PSAP Pengaturan Bersama
- PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran
- PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi dan Aset Kontingensi
- PSAP Agrikultur
- PSAP Imbalan Kerja

b. Permintaan Pertimbangan BPK

- PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian
- PSAP Instrumen Keuangan
- PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan

c. Siap Kirim ke BPK

- PSAP Sewa

d. Proses Penyusunan Draft

- PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran
- PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
- PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas
- PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintah Umum
- PSAP Penurunan Nilai Aset Bukan Penghasil Kas

e. Draft Revisi PSAP

- Revisi Kerangka Konseptual
- Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
- Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

- Revisi PSAP 07 Aset Tetap
- Revisi PSAP 13 Penyajian LK BLU
- Revisi PSAP 05 Akuntansi Persediaan

2. Penyusunan Bunga Rampai Tahun 2023

Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan 2023 yang berisi kompilasi surat-suat jawaban KSAP atas konsultasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Bunga Rampai Tahun 2023 dapat diunduh melalui:

<https://bit.ly/BungaRampaiTahun2023>

POJOK FAKTA



Tanggal 5 Oktober dijadikan sebagai sebagai hari jadi KSAP karena pada tanggal tersebut dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004.

Surat konsultasi pemangku kepentingan ke KSAP sebagaimana telah dibukukan dalam Bunga Rampai Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Instansi Tujuan	Perihal
1	Februari 2023	S-12/K.1/KSAP/II/2023	Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	Pendapat atas Pencatatan Bank Garansi
2	24 Maret 2023	S-17/K.1/KSAP/III/2023	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Pendapat atas Penyajian Beberapa Transaksi pada LKPD Tahun 2022
3	6 April 2023	S-24/K.1/KSAP/IV/2023	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Klasifikasi Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi
4	11 April 2023	S-25/K.1/KSAP/IV/2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Revisi Surat KSAP tentang Pendapat atas Penerapan PSAP 10 (Revisi), PSAP 16, dan PSAP 17
5	9 Juni 2023	S-37/K.1/KSAP/VI/2023	Pemerintah Kabupaten Bogor	Penjelasan Akuntansi Properti Investasi
6	9 Juni 2023	S-38/K.1/KSAP/VI/2023	Pemerintah Kabupaten Blitar	Konsultasi Penyajian Investasi Permanen pada PD. Savitri Indah (BUMD Kabupaten Blitar)
7	9 Juni 2023	S-39/K.1/KSAP/V/2023	Pemerintah Kabupaten Blitar	Konsultasi Penyajian Investasi Permanen pada PT. BPR HAS (BUMD Kabupaten Blitar)
8	4 Oktober 2023	S-66/K.1/KSAP/X/2023	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Penjelasan Akuntansi Properti Investasi
9	4 Oktober 2023	S-67/K.1/KSAP/X/2023	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Pendapat atas Pengakuan Hutang ADD
10	4 Oktober 2023	S-68/K.1/KSAP/X/2023	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pendapat terkait Penyusunan Pedoman Reviu Transparansi Fiskal
11	23 November 2023	S-83/K.1/KSAP/XI/2023	Pemerintah Kota Bekasi	Pendapat Terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
12	23 November 2023	S-84/K.1/KSAP/XI/2023	Pemerintah Kabupaten Solok	Pencatatan Barang Milik Daerah



PELAKSANAAN INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARD BOARD CONSULTATIVE ADVISORY GROUP (IPSASB CAG) MEETING TAHUN 2023

Pada tanggal 3 s.d. 10 Desember 2023, **Firmansyah N. Nazaroedin** selaku Anggota Komite Kerja KSAP dan **Joni Afandi** selaku Anggota Kelompok Kerja KSAP menghadiri kegiatan pertemuan *International Public Sector Accounting Standards Board Consultative Advisory Group* (IPSASB CAG) di Toronto, Canada.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa poin-poin penting yang dibahas di antaranya sebagai berikut.

- *Program And Technical Director's Report;*
- *Implementation Issues, Presentation on the Implementation of IPSAS in Cameroon;*
- *Presentation of Financial Statements;*
- *Natural Resources;*
- *Measurement - Application Phase;*
- *Sustainability Reporting.*

FASILITASI PERMINTAAN NARASUMBER DARI KSAP

Pada tahun 2023, anggota KSAP menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di antaranya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
1.	13 Januari 2023	<i>Workshop</i> Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2022	Dwi Martani	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	8 Februari 2023	Diskusi Perkembangan Implementasi PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi	<ul style="list-style-type: none"> • Dwi Martani • Didied Ary Setyanang 	Badan Pemeriksa Keuangan
3.	13 April 2023	Diskusi Rencana Penyampaian Permintaan Pertimbangan 4 Draf PSAP	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar • Prof. Dr. Ratna Wardhani • Isa Ashari Kuswandono 	Badan Pemeriksa Keuangan
4.	24 Mei 2023	FGD Pengelolaan BMD dan Optimalisasi Pengelolaan Aset (Keselarasan dengan PSAP 16 dan 17)	Didied Ary Setyanang	Kanwil DJPb D. I. Yogyakarta
5.	29 Mei 2023	Rapat Pembahasan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah berdasarkan PMK 84/2021 dan PMK 85/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Dwi Martani • Didied Ary Setyanang • Achmad Fauzi 	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
6.	31 Mei 2023	Sosialisasi Pengelola Akuntansi SKPKD terkait Perlakuan Akuntansi mengenai Aset Tetap, Aset Kontingensi, dan Akuisisi BUMD	<ul style="list-style-type: none"> • Joni Afandi • I Putu Sukma Hendrawan 	Pemerintah Kota Bekasi
7.	24 Juli 2023	FGD atas Pengelolaan Dana <i>Reimbursement</i> pada Mabes TNI dan Kepolisian	Dwi Martani	Badan Pemeriksa Keuangan
8.	23 Agustus 2023	FGD terkait Aset Biologis	Joni Afandi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
9.	12 September 2023	<i>Coaching Clinic</i> Standar Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar • I Putu Sukma Hendrawan 	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
10.	17 Oktober 2023	<i>FGD Pelaksanaan Hibah Financial Management Reform Programme: Penyiapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta di RDTL</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumiyati • Rahmat Mulyono • Achmad Fauzi 	PKN STAN
11.	18 Oktober 2023	FGD Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi	Prof. Dr. Ratna Wardhani	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12.	25-26 Oktober 2023	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh	Dr. Hamdani	Pemerintah Kota Payakumbuh
13.	30-31 Oktober 2023	FGD Kebijakan Akuntansi Dana Program (Trustee) pada BLU BPD LH	<ul style="list-style-type: none"> • Sumiyati • Dwi Martani • Joni Afandi • Achmad Fauzi 	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
14.	1 November 2023	FGD Inventarisasi Lahan PSU Perumnas Pemerintah Kota Bekasi	Achmad Fauzi	Pemerintah Kota Bekasi
15.	17 November 2023	FGD Draf Kajian Analisis Transaksi Resiprokal dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Lingkup Pemerintah Pusat	Yan Rahadian	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
16.	23 November 2023	FGD Diseminasi Akhir Kajian Hibah <i>Financial Management Reform Programme: Penyiapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta di RDTL</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumiyati • Wakhid Susilo 	PKN STAN
17.	30 November 2023	Rapat Pembahasan PSAP 17 Properti Investasi atas Pengelolaan BMD di Pemprov DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Yuniar Yanuar Rasyid • Ilham Akbar 	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
18.	3-10 Desember 2023	Pertemuan IPSASB CAG	<ul style="list-style-type: none"> • Firmansyah N. Nazaroedin • Joni Afandi 	IPSASB CAG
19	4 Desember 2023	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2023	I Putu Sukma Hendrawan	Pemerintah Kabupaten Purwakarta

PELAKSANAAN FASILITASI KUNJUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada tahun 2023, KSAP menerima kunjungan dari pemangku kepentingan dalam rangka konsultasi atas permasalahan seputar standar akuntansi pemerintahan. Berikut daftar pemangku kepentingan yang berkunjung ke KSAP selama tahun 2023:

No.	Tanggal	Instansi	Keperluan
1.	4 Januari 2023	Pemerintah Kota Bekasi	Konsultasi terkait koreksi aset tanah
2.	2 Maret 2023	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Konsultasi terkait laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022
3.	23 Mei 2023	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	Konsultasi
4.	23 Mei 2023	Pemerintah Kota Gorontalo	Konsultasi
5.	24 Mei 2023	Pemerintah Kota Bekasi	Konsultasi
6.	20 Juni 2023	Pemerintah Kabupaten Karawang	Konsultasi terkait properti investasi
7.	21 Juni 2023	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Konsultasi terkait penganggaran belanja modal dan <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
8.	26 September 2023	Pemerintah Kabupaten Solok	Konsultasi pencatatan tanah HGU
9.	24 Oktober 2023	Pemerintah Kota Bekasi	Konsultasi terkait persediaan hilang dan TGR
10.	31 Oktober 2023	Pemerintah Kabupaten Karawang	Konsultasi terkait penyajian utang
11.	2 November 2023	Pemerintah Kota Tarakan	Konsultasi terkait PSAP 16 dan PSAP 17, penyajian utang dan piutang
12.	23 November 2023	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Konsultasi terkait SAP
13.	30 November 2023	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Konsultasi terkait rekomendasi BPK terhadap perubahan kebijakan akuntansi beban dibayar di muka, properti investasi, konsesi jasa, aset biologis, dan penghapusan piutang
14.	11 Desember 2023	Pemerintah Provinsi Aceh	Konsultasi terkait kebijakan akuntansi penghapusan piutang dan properti investasi

PERBANDINGAN PSAP TERHADAP IPSAS (PAIRING PSAP TO IPSAS)

PER DESEMBER 2023

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
1.	<i>The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities</i>	Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	Tidak ada perbedaan signifikan.
2.	<i>IPSAS 1 Presentation of Financial Statements</i>	PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	PSAP 1 mengatur entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tidak diatur dalam IPSAS 1
3.	<i>IPSAS 2 Cash Flow Statements</i>	PSAP 03 Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas (LAK) pada IPSAS 2 menambahkan arus kas yang tidak diatur dalam IPSAS 2
4.	<i>IPSAS 3 Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors</i>	<ul style="list-style-type: none"> PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan (Revisi 2020) IPSAP 04 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan 	Tidak ada perbedaan signifikan
5.	<i>IPSAS 4 The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 12 Laporan Operasional Buletin Teknis 12 Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing draf PSAP Pengaruh Selisih Kurs 	Tidak ada pengaturan mata uang fungsional dan translasi
6.	<i>IPSAS 05 Borrowing Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> PSAP 09 Akuntansi Kewajiban Bultek 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua draf PSAP Biaya Pinjaman 	Bunga dibebankan sesuai dengan PSAP 09 dan Bultek 22, tidak ada pengaturan kapitalisasi bunga seperti dalam IPSAS 05

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
7.	<i>IPSAS 06 Consolidated and Separate Financial Statements</i>	PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	PSAP 11 menggunakan istilah entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang digabungkan atau dikonsolidasikan dan tidak mengenal konsep pengendalian, sehingga tidak ada pengaturan kepentingan minoritas.
8.	<i>IPSAS 7 Investments in Associates</i>	PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)	PSAP 06 menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi dalam asosiasi seperti dalam IPSAS 7, namun tidak mengatur perubahan metode jika kepemilikan berubah dan penyajian nilai investasi jika tanggal laporan keuangan investee dan investor berbeda
9.	<i>IPSAS 8 Interests in Joint Ventures</i>	IPSAS 8 sudah diamandemen ke IPSAS 37 <i>Joint Arrangement</i> . Tidak perlu diperbandingkan	
10.	<i>IPSAS 9 Revenue From Exchange Transactions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas • PSAP 12 Laporan Operasional • Bultek 23 Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan • draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran 	Substansi sama, namun PSAP 02, PSAP 12 dan Bultek 23 tidak membedakan pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran dan non pertukaran seperti dalam IPSAS 9
11.	<i>IPSAS 10: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies</i>	Belum ada	
12	<i>IPSAS 11 Construction Contracts</i>	Belum ada	
13	<i>IPSAS 12 Inventories</i>	PSAP 05 Akuntansi Persediaan	PSAP 05 tidak menggunakan penilaian metode <i>lower of cost and net realizable value</i> namun hanya menggunakan nilai perolehan, namun pengungkapan ketika persediaan rusak diperlukan.
14	<i>IPSAS 13 Leases</i>	<i>(superseded by IPSAS 39)</i>	<i>(superseded by IPSAS 43)</i>
15.	<i>IPSAS 14 Events after the Reporting Date</i>	<i>PSAP 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan</i>	

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
16.	<i>IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation</i>		IPSAS 15 telah digantikan dengan IPSAS 28, IPSAS 29, dan IPSAS 30.
17.	<i>IPSAS 16 Investment Property</i>	PSAP 17 Properti Investasi	
18.	<i>IPSAS 17 Property, Plant, And Equipment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap • Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual 	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP menggunakan metode biaya dan revaluasi hanya diperkenankan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. • Dalam depresiasi, PSAP tidak mengatur adanya nilai residu dan tidak mengatur review masa manfaat, nilai residu dan metode depresiasi setiap tanggal pelaporan. • PSAP tidak mengatur impairment seperti IPSAS
19.	<i>IPSAS 18 Segment Reporting</i>	Belum ada	Tidak ada pengaturan
20.	<i>IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • Bultek 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrual • draf PSAP Provisi, Kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi 	PSAP dan Bultek belum mengatur mengenai Aset Kontinjen, sebagaimana diatur dalam IPSAS 19. Provisi akan diakui jika telah dianggarkan.
21.	<i>IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets</i>	Proses Kajian draf	
22.	<i>IPSAS 21 Impairment of Non-Cash Generating Assets</i>	Proses Kajian draf	
23.	<i>IPSAS 22 Disclosure of Financial Information about the General Government Sector</i>	Proses Kajian draf	

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
24.	<i>IPSAS 23 Revenue From Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas • PSAP 12 Laporan Operasional • Bultek 21 Akuntansi Transfer • Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan • Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran 	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP dan Bultek tidak membedakan pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran dan non pertukaran seperti IPSAS 09 dan IPSAS 23 • Perbedaan definisi transfer pada IPSAS 23 dengan PSAP dan Bultek.
25.	<i>IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial Statements</i>	PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	PSAP 02 mengatur pencatatan dan pelaporan anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Pelaporan dan pengungkapan informasi realisasi anggaran dalam PSAP 02 lebih lengkap.
26.	<i>IPSAS 25 Employee Benefits</i>	<i>(superseded by IPSAS 39)</i>	<i>(superseded by IPSAS 39)</i>
27.	<i>IPSAS 26 Impairment of Cash Generating Assets</i>	Proses Kajian draf	Tidak diatur penurunan nilai, namun aset yang mengalami kerusakan diungkapkan dalam laporan keuangan.
28.	<i>IPSAS 27 Agriculture</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap • Buletin Teknis No 15 Aset Tetap Akrua • Draf PSAP Agrikultur 	PSAP 07 dan Buletin Teknis No 15 mengatur Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Pertanian, berupa hewan, ikan, dan tanaman. Pengukuran menggunakan harga perolehan dan metode biaya seperti aset tetap tidak sebagai aset biologis seperti pada IPSAS 27.
29.	<i>IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • Bultek 16 Piutang Berbasis Akrua • Draf PSAP Instrumen Keuangan 	Penyajian instrumen keuangan diatur secara umum dalam PSAP 01, sebagai investasi jangka pendek dan pinjaman diatur dalam PSAP 06, kewajibandiatur dalam PSAP 09 dan piutang diatur dalam Bultek 16.

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
30.	<i>IPSAS 29 Financial Instruments: Recognition and Measurement</i>	(superseded by IPSAS 41)	(superseded by IPSAS 41)
31.	<i>IPSAS 30 Financial Instruments: Disclosure</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan • PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • Draf PSAP Instrumen Keuangan - Penyajian 	Pengungkapan instrumen keuangan telah diatur secara umum dalam PSAP 04 dan secara khusus dalam PSAP 06 terkait pengungkapan instrumen investasidan PSAP 09 terkait pengungkapan instrumen kewajiban.
32.	<i>IPSAS 31 Intangible Assets</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua</i> • <i>PSAP 14 Aset Tak Berwujud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bultek menggunakan metode biaya dan revaluasi hanya diperkenankan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. • Dalam amortisasi Bultek / Draft PSAP tidak mengatur adanya nilai residu dan tidak mengatur review masa manfaat, nilai residu dan metode depresiasi setiap tanggal pelaporan. • PSAP tidak mengatur impairment seperti IPSAS
33.	<i>IPSAS 32 Service Concession Arrangement: Grantor</i>	PSAP 16 Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi	Terdapat hal-hal perbedaan yang membutuhkan penyesuaian untuk dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah
34.	<i>IPSAS 33: First Time Adoption of International Public Sector Accounting Standards</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis 01 untuk Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat • Buletin Teknis 02 untuk Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah • IPSAP 4 untuk Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan 	IPSAP dan Buletin Teknis diharapkan dapat menjembatani entitas dalam penerapan akrua pertama kali dari basis kas menuju akrua.

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
35.	<i>IPSAS 34 Separate Financial Statements</i>	Belum ada	Praktik dalam penyusunan laporan pemerintah, tidak ada konsolidasi dengan perusahaan milik negara, sehingga laporan keuangan pemerintah merupakan keuangan tersendiri.
36.	<i>IPSAS 35 Consolidated Financial Statements</i>	PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	PSAP 11 mengatur konsolidasi dengan entitas akuntansi dan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban, sehingga dasarnya bukan pengendalian seperti dalam IPSAS 35.
37.	<i>IPSAS 36 Investment in Associates and Joint Ventures</i>	<i>PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</i>	PSAP 06 tidak mengatur impairment losses, perubahan pencatatan dalam investasi asosiasi. Tidak ada pengatur untuk pengendalian seperti dalam IPSAS 36.
38.	<i>IPSAS 37 Joint Arrangements</i>	Draf PSAP Pengaturan Bersama	Penyajian aset yang dikerjasamakan telah diatur dalam Bultek Aset Tetap, namun kerjasama yang lain bentuk diatur.
39.	<i>IPSAS 38 Disclosure of Interest in other Entities</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan • PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) 	PSAP 01, PSAP 04 dan PSAP 06 mengatur secara umum pengungkapan investasi pada entitas lain namun belum detail seperti dalam IPSAS 38
40.	<i>IPSAS 39 Employee Benefit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • PSAP 12 Laporan Operasional • Bultek 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua • Draf PSAP Imbalan Kerja 	IPSAS 25 mengatur <i>employee benefit</i> dengan pendekatan akrua. PSAP mengatur beban gaji dan pension sebesar jumlah yang dibayarkan namun belum ada pembentukan pencadangan
41.	<i>IPSAS 40 Public Sector Combinations</i>		

No.	IPSAS	SAP	Perbedaan
42.	<i>IPSAS 41 financial Instruments</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • Draf PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan dan pengakuan diklasifikasikan berdasarkan jenis instrumen yaitu investasi jangka pendek dan Panjang, kewajiban dan piutang. • Pengukuran dengan menggunakan harga perolehan. • Penurunan nilai piutang berdasarkan estimasi.
43.	<i>IPSAS 42 Social Benefits</i>	Proses Kajian draf	
44.	<i>IPSAS 43 Leases</i>	Draf PSAP Sewa	

Selayang Pandang

2 PSAP dalam Proses Penetapan PMK



PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

Pernyataan Standar mensyaratkan entitas untuk mengakui:

- pendapatan ketika entitas menerima aliran sumber daya dari pihak lain namun tidak memberikan imbalan secara langsung terhadap sumber daya tersebut;
- aliran sumber daya dapat berupa kas maupun nonkas harus memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset;
- kewajiban jika terdapat kemungkinan keluarnya aliran sumber daya ekonomi atau potensi jasa yang diperlukan bagi penyelesaian kewajiban tersebut.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO 18

PENDAPATAN DARI TRANSAKSI
NONPERTUKARAN
(PERPAJAKAN DAN TRANSFER)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO 19

PENGATURAN BERSAMA

PENGATURAN BERSAMA

Pernyataan Standar ini mendefinisikan pengendalian bersama (*joint control*) dan mensyaratkan entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.



06 Laporan Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan KSAP



Sesuai dengan pasal 9 Keppres 84 Tahun 2004, dalam melaksanakan tugasnya KSAP dibantu oleh Sekretariat KSAP. Dalam melaksanakan fungsi fasilitasi terhadap KSAP dan sebagai pelaksana kesekretariatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021, dilakukan oleh Seksi Fasilitasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (FKSAP) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KSAP. Seksi FKSAP merupakan seksi yang berada pada Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan:

1. Dukungan Administrasi Keanggotaan dan Persuratan KSAP;
2. Fasilitasi Kegiatan Rapat Pleno KSAP;
3. Penyusunan Konsep Laporan Tahunan KSAP;
4. Pemeliharaan Website dan Media Sosial Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Dukungan Penyediaan Materi sebagai Bahan Rapat;
6. Dukungan Penyediaan Bahan-bahan Pendukung dalam Pembuatan draf PSAP;
7. Dukungan Finalisasi draf PSAP menjadi PMK;
6. Dukungan Penyusunan Bunga Rampai.

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KSAP

1. Dukungan Administrasi Keanggotaan dan Persuratan KSAP

Satker KSAP melaksanakan seluruh dukungan administrasi keanggotaan dan persuratan KSAP. Dukungan keanggotaan tersebut diantaranya pembuatan berbagai Surat Keputusan (SK) maupun Surat Tugas (ST) bagi anggota KSAP, sedangkan layanan persuratan meliputi layanan surat menyurat terkait konsultasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan layanan persuratan internal.

2. Fasilitasi Kegiatan Rapat Pleno KSAP Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Rapat Pleno	41 kegiatan
2.	Rapat Pleno Komite Konsultatif	3 kegiatan
3.	<i>Focus Group Discussion</i>	5 kegiatan
4.	Rapat Tim Kecil	17 kegiatan

3. Penyusunan Konsep Laporan Tahunan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2022 telah dibuat dan dipublikasikan pada laman KSAP. Laporan tersebut berisi seluruh pencapaian KSAP selama tahun 2022 serta sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi terhadap seluruh kegiatan KSAP

selama satu tahun. Laporan Tahunan KSAP Tahun 2022 dapat diakses secara online melalui:

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2022

4. Pemeliharaan Website dan Media Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemeliharaan serta update konten pada *website* KSAP dilakukan secara berkala dan rutin. Sampai dengan Desember 2023, telah diterbitkan sebanyak 19 artikel maya pada *website* www.ksap.org. Artikel-artikel maya tersebut berisi mengenai makalah dan majalah maya buah hasil pemikiran baik dari para anggota maupun dari para pemangku kepentingan KSAP mengenai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, dimuat juga berbagai informasi dan update kegiatan yang dilaksanakan oleh KSAP.

Selain *website*, sekretariat KSAP juga mengelola media sosial lainnya yaitu *instagram* dan *youtube*. Konten-konten yang di unggah di media sosial *instagram* adalah konten edukasi mengenai PSAP dan informasi update mengenai akuntansi. Sedangkan media sosial *youtube* digunakan untuk penayangan kegiatan secara *live* baik *Public Hearing*, sosialisasi maupun *training of trainers* mengenai PSAP.

5. Dukungan Penyediaan Materi sebagai Bahan Rapat

Tugas dan tanggungjawab lain dari Sekretariat KSAP adalah sebagai unit pendukung dalam penyediaan materi

bahan rapat yang akan digunakan oleh anggota KSAP. Di tahun 2023, seluruh kegiatan yang melibatkan KSAP, sekretariat turut serta secara aktif dalam dukungan penyediaan materi.

6. Dukungan Finalisasi draf PSAP menjadi PMK

Sekretariat KSAP memiliki tugas dalam proses finalisasi draf PSAP menjadi PMK. Dukungan tersebut berupa kegiatan *proofreading* draf final PSAP yang telah diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Keuangan selaku *unit in charge* yang menangani penerbitan PMK. Di tahun 2023 yang masih berlanjut hingga tahun 2024, sekretariat telah melakukan dukungan dalam proses penerbitan PMK untuk PSAP Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran serta PSAP Pengaturan Bersama.

7. Dukungan Penyusunan Bunga Rampai

Selain PSAP, produk lain yang dihasilkan oleh KSAP adalah Bunga Rampai. Bunga Rampai KSAP merupakan kompilasi surat-surat berisi pertanyaan maupun konsultasi mengenai akuntansi beserta dengan jawaban yang telah di susun oleh KSAP. Sekretariat KSAP berperan sebagai kompilator dan publikasi. Bunga Rampai Tahun 2023 keseluruhannya telah di publikasi di *website* resmi KSAP.

Sosial Media KSAP



Website

www.ksap.org



S A P

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi ...

Selengkapnya »



YouTube

[Komite Standar Akuntansi Pemerintahan](#)



Sosialisasi Online PSAP 16 dan PSAP 17



Acara Peringatan Hari Jadi KSAP Ke-17 Tahun 2021



Instagram

[@ksap.indonesia](#)



The image shows two Instagram posts. The top post is titled 'PENCARKAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN' and features a graphic with two main points: '01. Laporan Keuangan' and '02. Laporan Keuangan'. The bottom post is titled 'Testing of Trainers' and features a photo of three people sitting on a stage. Both posts have engagement metrics like likes and comments.

07 Laporan Pelaksanaan Tugas KSAP sebagai Satuan Kerja



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) merupakan sebuah organisasi independen yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KSAP juga berperan sebagai satuan kerja (satker) yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang tergabung dalam Bagian Anggaran 015 Kementerian Keuangan. Lebih spesifiknya lagi, KSAP merupakan salah satu satker yang secara struktur organisasi berada dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tugas Pokok dan Fungsi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Satker:

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga dan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Pemeliharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga dan Rencana Anggaran

Penyusunan rencana anggaran berdasar pagu Indikatif maupun pagu Definitif tahun anggaran 2024 telah selesai disusun dan menghasilkan DIPA dengan nomor SP DIPA-015.08.1.439165/2024 tanggal 30 November 2023.

2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun anggaran 2023, satuan kerja KSAP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.867.538.000 sesuai dengan DIPA KSAP nomor DIPA-015.08.1.439165/2023 tanggal 30 November 2022. Demi kelancaran proses pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran, KSAP membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang pada tahun 2023 memiliki susunan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	Esti Dwi Arvina
Pejabat Pembuat Komitmen	Achmad Fauzi
Pejabat Penandatangan SPM	Joko Tri Prasetyo
Bendahara Pengeluaran	Satria Mahardika
Staff Pengelola Keuangan	1. Michael Orsted S. 2. Nia Esti Wulansari

Laporan Keuangan satker KSAP sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan anggaran disusun setiap dua kali dalam tahun (disusun secara semesteran). Untuk periode pelaporan tahun anggaran 2023, Laporan Keuangan satker KSAP telah disusun dan dikirim ke Setditjen Perbendaharaan tepat waktu sesuai dengan surat KSAP nomor ND-136/PB.61/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintahan T.A. 2023.

3. Pemeliharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja KSAP adalah sebagai berikut:

- Satu unit mobil minibus;
- Satu unit sepeda motor;
- Dua unit alat penghancur kertas;
- Dua unit LCD *Projector*;
- Satu unit *Camera Conference*;
- Satu unit alat studio lainnya;
- Satu unit *Coffee Maker*;
- Satu buah P.C. Unit;
- Satu unit *Camera Digital*;
- Enam unit *NoteBook*;
- Dua unit PC Tablet;
- Enam unit *printer*;
- Tiga unit *scanner*;
- Satu buah *External/Portable Hardisk*

Satker KSAP sedang berproses untuk melakukan penghapusan BMN Satker KSAP di tahun 2024 berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-152/MK.5/PB.1/2023 tanggal 28 November 2023 Hal: Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan saat ini, proses sudah masuk dalam tahap permohonan kepada KPKNL Jakarta II.

Telah dibuat Laporan Barang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023 dan dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Surat Nomor: S-05/KPA/KSAP/1/2024 tanggal 17 Januari 2023 hal Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Tahun Anggaran 2023.

History in Frame



08 Penutup



Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan di semua lini pasca berakhirnya Pandemi Covid-19. KSAP sebagai *standard setter* memberikan kontribusi terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara selama masa pemulihan tersebut melalui percepatan penyelesaian standar akuntansi pemerintahan yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2023. Kami senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Besar harapan kami, pencapaian yang telah diraih oleh KSAP pada tahun lalu menjadi tonggak dalam mewujudkan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel.

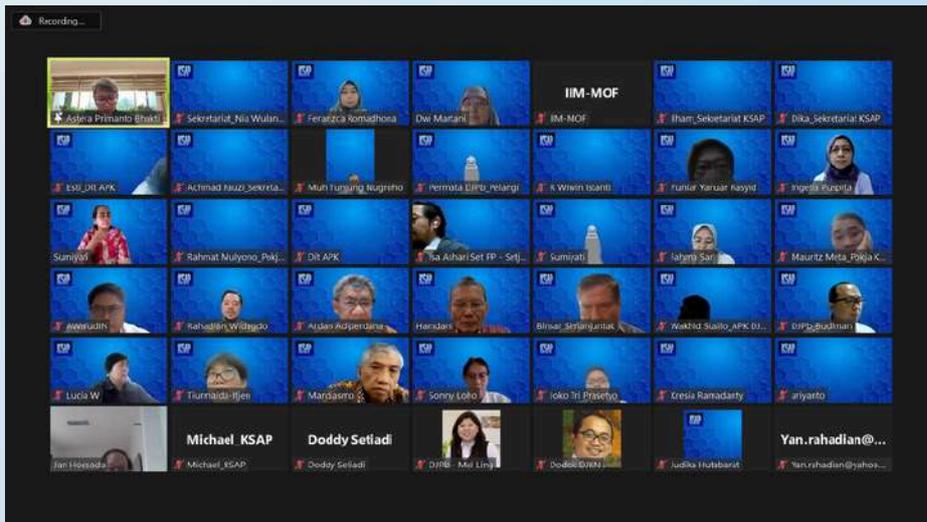
Terakhir, Laporan Tahunan 2023 ini merupakan laporan KSAP. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik yang terkait dengan substansi standar, interpretasi standar, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat memberikan dukungan teknis implementasi untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

- KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN -



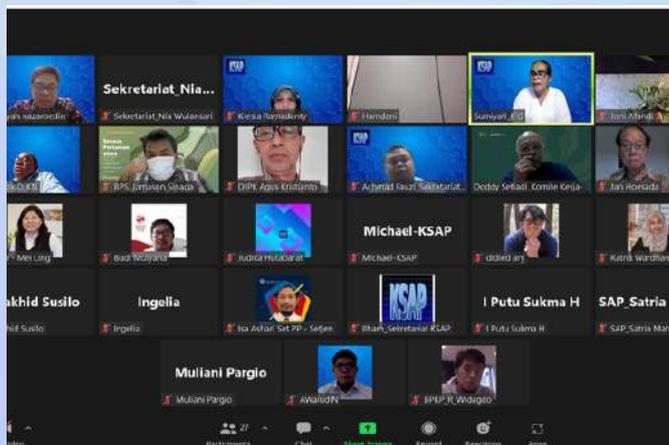
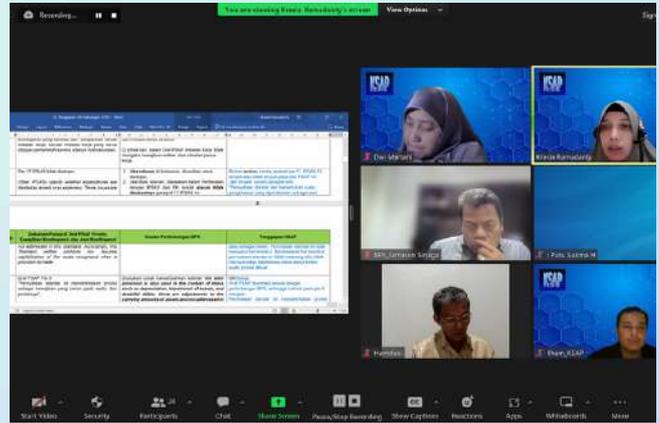
Dokumentasi Kegiatan

RAPAT PLENO KOMITE KONSULTATIF



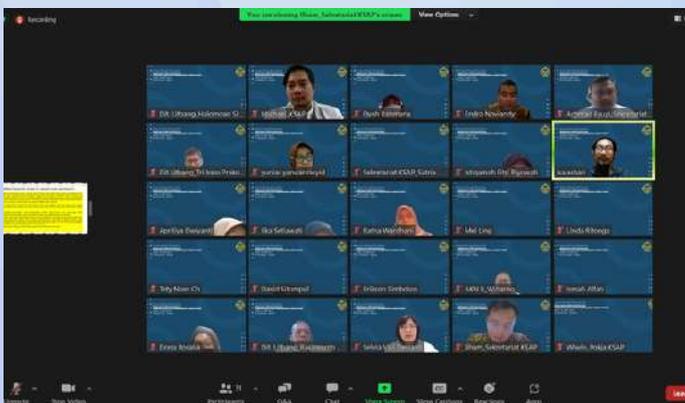
Dokumentasi Kegiatan

RAPAT PLENO MINGGUAN



Dokumentasi Kegiatan

FOCUS GROUP DISCUSSION



Dokumentasi Kegiatan

FASILITASI KUNJUNGAN KSAP



Dokumentasi Kegiatan

TRAINING OF TRAINERS (TOT)





**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE

**Sekretariat: Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt.2
Jalan Budi Utomo No.6, Jakarta 10710 Indonesia
Tel/Fax: (021) 344 9230 Ext.5311 Email:
sekretariat.ksap@gmail.com**